

Menilik Kerja Sama Triangular Indonesia-Afganistan-Jerman di Bidang Kebijakan Fiskal*

Kerja sama triangular dapat diartikan sebagai kerja sama antara donor tradisional dengan penyedia kerja sama selatan-selatan (KSS) untuk melaksanakan proyek ataupun kegiatan kerja sama pembangunan di negara penerima bantuan. Dibandingkan dengan KSS yang telah ada sejak konferensi Asia-Afrika tahun 1955, kerangka kerja sama triangular merupakan modalitas kerja sama pembangunan yang lebih baru. Kerja sama triangular memungkinkan ketiga negara yang terlibat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memberikan manfaat yang nyata bagi negara penerima. Kerja sama ini juga dianggap untuk melengkapi dan mengisi kelemahan-kelemahan yang muncul dari kerangka kerja sama selatan-selatan dan kerja sama utara-selatan yang telah ada selama ini. Misalnya, ketika Jepang akan memberikan bantuan pelatihan kepada Timor Leste di sektor pertanian, maka Indonesia dilibatkan untuk memberikan *knowledge and experience sharing* kepada Timor Leste. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dibandingkan dengan sektor pertanian Jepang yang telah maju, sektor pertanian Indonesia lebih dapat dipahami dan memiliki mesin pertanian yang operasionalisasinya lebih mudah bagi Timor Leste yang masih dalam tahap awal dalam mengembangkan sektor pertanian di negaranya.

Pola lain dari Kerja sama triangular yang dilakukan oleh Indonesia adalah kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Afganistan, dan Jerman dalam bidang pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam kerja sama ini, kedua negara setuju untuk melibatkan Jerman sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan kerja sama teknik antara Indonesia dan Afganistan. Sebagai donor tradisional yang telah banyak melaksanakan kerja sama teknik dengan negara mitra khususnya dalam kerangka triangular, Pemerintah Jerman melalui *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ) turut berkontribusi dalam mendorong pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan kerja sama teknik di bidang kebijakan fiskal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Afganistan.

Kerja sama teknik antara kedua negara ini dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani pada tahun 2017 oleh perwakilan dari kedua negara pada saat kunjungan Presiden Ashraf Gani ke Indonesia. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di area makroekonomi dan kebijakan fiskal dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas Kementerian Keuangan Afganistan dalam perumusan kebijakan fiskal. Afganistan masih memiliki kapasitas institusional dan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga mengharapkan bantuan Kementerian Keuangan Indonesia yang dianggap berhasil dalam mengelola kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejak jatuhnya pemerintahan Taliban pada tahun 2001, para donor internasional, baik bilateral maupun lembaga internasional, memberikan bantuan hibah untuk membangun kembali Afganistan. Sejak saat itu, ekonomi Afganistan sangat tergantung pada hibah yang diperoleh dari pihak asing yang dijadikan sebagai penerimaan negara yang utama dalam mendanai kebutuhan belanja dan pembangunan di dalam negeri. Ketergantungannya yang tinggi pada bantuan internasional dan isu keamanan dan kondisi politik yang tidak stabil memunculkan tantangan atas ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut. Penerimaan negara difokuskan untuk belanja di bidang keamanan sehingga isu-isu untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mendapat perhatian. Kondisi ekonomi Afganistan semakin menurun setelah berkurangnya bantuan dari masyarakat internasional yang mengakibatkan penerimaan negara semakin terbatas. Oleh karena itu,

sejak tahun 2017, dengan visi *self-reliance*, pemerintah Afganistan mulai berbenah diri untuk memperbaiki pemerintahannya serta untuk mencari sumber-sumber penerimaan baru guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serangkaian reformasi dilakukan di berbagai bidang termasuk di dalamnya reformasi anggaran dan fiskal.

Dalam rangka mendukung reformasi fiskal di Afganistan tersebut serta untuk melaksanakan MoU kerja sama teknik Indonesia-Afganistan di bidang kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam kurun waktu dua tahun ini telah melaksanakan dua kali pertukaran pengalaman dan pengetahuan dengan Kementerian Keuangan Afganistan melalui pelatihan internasional. Pelatihan pertama dilaksanakan pada tahun 2017 dengan skema KSS yang memberikan pemahaman bagi Afganistan atas penyusunan dan implementasi kebijakan makroekonomi dan fiskal Indonesia, termasuk proses penyusunan anggaran.

Pada tanggal 9 s.d. 13 Desember yang lalu, BKF kembali melaksanakan *knowledge and experience sharing* dengan Afganistan terkait dengan pengelolaan kebijakan fiskal. Dibandingkan dengan pelatihan di tahun 2018, ada nuansa yang baru dalam pelaksanaan kerja sama teknik tahun ini, yaitu keterlibatan Jerman melalui kerangka kerja sama triangular. Kontribusi dari masing-masing pihak ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih konkrit bukan hanya bagi reformasi kebijakan fiskal di Afganistan tetapi juga kemitraan di antara ketiga negara dalam rangka memajukan pembangunan global. Namun demikian, supaya kerja sama triangular ini dapat memberikan dampak yang maksimal, maka terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, kepemilikan (*ownership*) dari masing-masing pihak yang terlibat. Pemerintah Indonesia melalui Badan Kebijakan Fiskal memiliki komitmen yang kuat dalam berkontribusi pada pembangunan global, dalam hal ini membantu Afganistan untuk mencapai tujuan pembangunannya. Pemerintah Jerman dengan pengalamannya dalam kerja sama triangular juga memiliki komitmen untuk membantu Afganistan dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Komitmen kuat dari dua negara ini tentu saja harus didukung dengan komitmen dari Afganistan sebagai penerima manfaat atas kerja sama ini. Adanya kesadaran dari pihak penerima manfaat mengenai pentingnya kerja sama ini bagi negara pembangunan di negara tersebut, akan mendorong adanya komitmen yang sama kuatnya dengan komitmen yang dimiliki baik oleh Indonesia maupun Jerman.

Kedua, kerja sama triangular perlu untuk memfokuskan pada hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini, tujuan utama yang ingin dicapai dalam kerja sama ini adalah meningkatkan kapasitas institusional Kementerian Afganistan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, kerja sama triangular yang dilakukan harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari Afganistan dan juga disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dilakukan dengan adanya komunikasi yang intens baik antara Indonesia dan Afganistan maupun dengan Jerman. Di sisi lain, Jerman juga dapat memberikan masukan mengenai bagaimana tujuan tersebut dapat secara efektif dicapai melalui serangkaian kegiatan dan pengalaman Jerman selama ini.

Ketiga, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama triangular. Mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi penting dalam implementasi kerja sama yang berlangsung dalam periode tahun jamak. Melalui mekanisme monitoring ini, maka masing-masing pihak dapat melihat output dari kegiatan yang dilakukan dan sudah sejauh mana output tersebut berkontribusi pada pencapaian dari target yang telah ditentukan. Selain itu, mekanisme evaluasi juga dilakukan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kerja sama yang dilakukan. Melalui mekanisme ini, maka kualitas pelaksanaan kerja sama di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan

melihat hasil dari evaluasi yang dilakukan. Dalam hal kerja sama triangular di bidang kebijakan fiskal ini, maka baik Indonesia dan Afganistan perlu untuk melihat dan menganalisis output yang telah dihasilkan dari implementasi pelatihan selama dua tahun ini serta mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pelatihan terhadap pencapaian tujuan kerja sama. Jerman sebagai mitra triangular juga berperan penting dalam mendorong efektivitas kerja sama pembangunan yang dilakukan dengan ikut memberikan masukan untuk evaluasi atas implementasi kerja sama Indonesia dan Afganistan.

Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut di atas, maka kerja sama triangular yang dilakukan antara Indonesia, Jerman, dan Afganistan di bidang kebijakan fiskal dapat berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi di Afganistan yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan global melalui kemitraan bersama.

**Ditulis oleh Ari Sulistyowati, Fungsional Analis Kebijakan Muda pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral*